

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sumenep, Februari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMENEP



PURWO EDI PRAWITO, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770908 199802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	38
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
BAB IV PENUTUP	47

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kewenangan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep mempunyai fungsi :

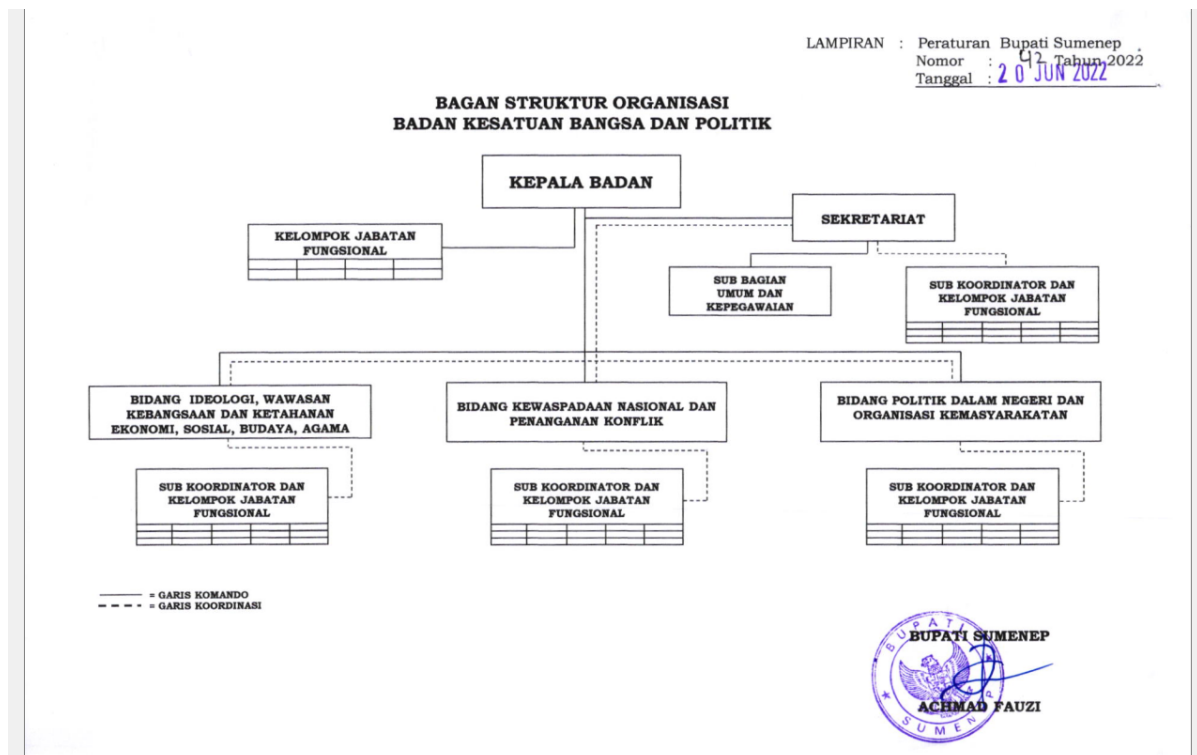
1. Perumusan, perencanaan, pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan strategis pembangunan kesatuan bangsa dan politik;
2. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

4. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya serta penanganan konflik sosial guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
5. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang/Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep.

Gambar 1.1.

**Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 sebagai berikut :

No	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Kurangnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila serta kurangnya wawasan kebangsaan	Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik sosial
		Peningkatan peran serta masyarakat menjaga keamanan dan lingkungan
		Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

- BAB I PENDAHULUAN
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
- BAB II PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
- BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

“Sumenep Unggul, Mandiri Dan Sejahtera”

MISI :

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
- Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal.
- Misi 5 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) **Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep** berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD yaitu Misi ke 4 dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diterfensi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal	Mewujudkan Harmonisasi Yang Berkearifan Lokal	Terwujudnya Nilai-Nilai Gotong Royong dan Toleransi dalam Kehidupan Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik Sosial
				Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu
				Persentase Organisasi Masyarakat Yang Aktif

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Harmonisasi Yang Berkearifan Lokal (RPJMD)	1. Terwujudnya Masyarakat yang Kondusif	Persentase Penurunan Konflik Sosial	5%	5%	5%	5%	5%
			Persentase Peran Serta Masyarakat	-	-	75,50%	-	-

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			dalam Pemilu						
		2.	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Penguatan Toleransi dan Pembangunan	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif	31,43	36,19	40,95	45,71	50,48

Sumber : Renstra BAKESBANGPOL Kab. Sumenep periode 2021-2026

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Masyarakat Yang Kondusif	1.1. Persentase Penurunan Konflik Sosial	%	Banyaknya konflik sosial yang sudah tertangani	$\frac{\text{Jumlah Konflik Sosial Tahun (n)} - \text{Jumlah Konflik Sosial Tahun (n-1)}}{100} \times \text{Jumlah Konflik Sosial Tahun (n)}$	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
		1.2. Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu	%	-	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Pemilihan Umum}}{100} \times \text{Jumlah Pemilihan Umum}$	Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
2.	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam	2.1. Persentase Organisasi Masyarakat Yang Aktif	%	Banyaknya jumlah Ormas/LSM yang Aktif	$\frac{\text{Jumlah Ormas/LSM Yang Aktif}}{100} \times \text{Jumlah Ormas/LSM Yang Terdaftar}$	Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

	Penguatan Toleransi dan Pembangunan						
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber : Indikator Kinerja Utama BAKESBANGPOL Tahun 2023

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2023 :

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahun 2023
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Mewujudkan Harmonisasi Yang Berkearifan Lokal (RPJMD)	1.	Terwujudnya Masyarakat yang Kondusif	Persentase Penurunan Konflik Sosial	%	5%
				Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu	%	-
		2.	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Penguatan Toleransi dan Pembangunan	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif	%	36,19

Sumber : Rencana Kerja BAKESBANGPOL Kabupaten Sumenep tahun 2023

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25 Januari 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 15 bulan November tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan alokasi anggaran dan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran. Berikut perjanjian kinerja setelah dan sebelum perubahan :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten
Sumenep Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3		4	5	6
1.	Terwujudnya Masyarakat Yang Kondusif	1.1.	Persentase Penurunan Konflik Sosial	%	5%	5%
		1.2	Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu	%	-	-
2.	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Penguatan Toleransi dan Pembangunan	2.1	Persentase Oraganisasi Masyarakat Yang Aktif	%	36,19%	36,00
3.	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	3.1	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	97,00

Sumber : Perjanjian Kinerja BAKESBANGPOL Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Sumenep :

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan BAKESBANGPOL Sebelum dan Sesudah
Perubahan Tahun 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	98%	1.036.744.185	979.304.185
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANG AN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdaftar	100%	100%	1.971.933.800	39.646.933.80 0
3	PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENGAWASAN	Persentase Organisasi Masyakat	100%	88%	76.303.200	76.303.200

	ORGANISASI KEMASYARAKA TAN	yang Di Berdayakan				
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANG AN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Forum Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang Terfasilitasi	100%	95%	2.161.512.430	679.512.430
5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunan Konflik Sosial	100%	65%	1.436.927.000	1.681.112.200
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/K OTA	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	97,00%	3.770.995.165	4.324.365.049

Sumber : DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Sumenep Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Terwujudnya Masyarakat Yang Kondusif	Persentase Penurunan Konflik Sosial	5%	5%	5%	Sangat Tinggi	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
		Persentase Peran Serta	-	-	-	-	Bidang Politik dalam

		Masyarakat dalam Pemilu					Negeri dan Organisasi Masyarakat
2	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Penguatan Toleransi dan Pembangunan	Persentase Organisasi Masyarakat Yang Aktif	36,19	34,61	34,61	Sangat Tinggi	Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel diatas, secara umum persentase tingkat capaian tujuan dan sasaran tahun anggaran tahun 2023, masuk dalam kriteria sangat baik. Seluruh tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep memenuhi target kinerja.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Masyarakat Yang Kondusif	Persentase Penurunan Konflik Sosial	5%	5%	5%	5%	5%	5%
		Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu	-	-	-	-	-	-
2	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Penguatan Toleransi dan Pembangunan	Persentase Organisasi Masyarakat Yang Aktif	31,43	31,03	31,03	36,19	34,61	34,61

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel 3.3 perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup baik.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Terwujudnya Masyarakat Yang Kondusif	Persentase Penurunan Konflik Sosial	5%	5%	100%
		Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu	-	-	-
2	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Penguatan Toleransi dan Pembangunan	Persentase Organisasi Masyarakat Yang Aktif	36,19	50,48	71,69

Berdasarkan tabel 3.4 perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah menyatakan tingkat kemajuan capaian tujuan/sasaran pada tahun 2023 dengan target akhir yang memiliki capaian sangat tinggi dengan satu indikator yang tidak mencapai 100%, yaitu persentase organisasi masyarakat yang aktif. Hal ini dikarenakan minimnya ormas yang tidak melengkapi persyaratan. Upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi ormas dalam proses mendaftar.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Kabupaten Pamekasan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Terwujudnya Masyarakat Yang Kondusif	Persentase Penurunan Konflik Sosial	5%	95,06%	5,26%
		Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu	-	-	-
2	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Penguatan Toleransi dan Pembangunan	Persentase Organisasi Masyarakat Yang Aktif	36,19	85%	42,57%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Meningkatkan Solidaritas di Masyarakat	Indeks Solidaritas Sosial	71,13				

	Terwujudnya Masyarakat Yang Kondusif	Persentase Penurunan Konflik Sosial	5%	5%	5%		
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Lembaga Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	98,41%	98,41%		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	98,41%	98,41%		

	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Forum Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang Terfasilitasi	100%	94,62%	94,62%		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sesuai peraturan yang berlaku	100%	94,62%	94,62%		
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Sosial	100%	60,98%	60,98%		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan	Jumlah laporan Penanganan Konflik Sosial	100%	60,98%	60,98%		

	n Kewaspada an Nasional dan Penangana n Konflik Sosial	dan Kewas padaan Nasion al disusu n sesuai dengan peratur an yang berlaku					
		Persen tase Peran Serta Masyar akat dalam Pemilu	-	-	-		
	Program Peningkata n Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengemba ngan Etika Serta Budaya Politik	Persen tase Organi sasi Masya rakat yang Terdaft ar	100%	99,99%	99,99%		

<p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Pelaksnaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p>	<p>Jumlah Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik sesuai peraturan yang berlaku</p>	<p>100%</p>	<p>99,99%</p>	<p>99,99%</p>		
---	--	-------------	---------------	---------------	--	--

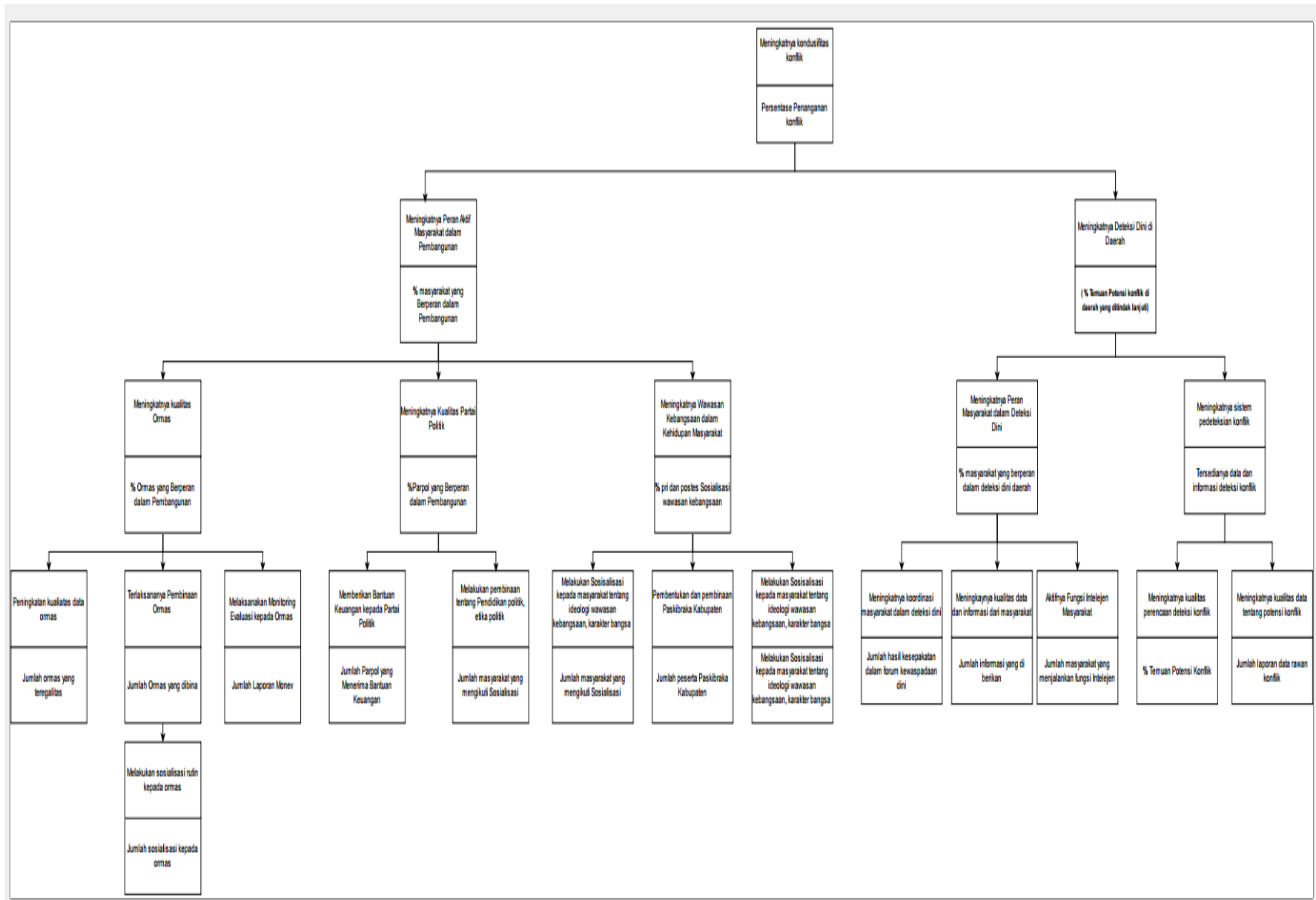
	Mewujudkan Nilai-Nilai Gotong Royong dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Gotong Royong	3,15				
	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Penguatan Toleransi dan Pembangunan	Persentase Organisasi Masyarakat Yang Aktif	36,19	34,61	34,61		
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yang diberdayakan	100%	87,66%	87,66%		

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat sesuai peraturan yang berlaku	100%	87,66%	87,66%		

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel 3.6 diatas, Terwujudnya masyarakat yang kondusif menggambarkan sudah sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakan. Sasaran tersebut mencakup Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya serta Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial. Sasaran Terwujudnya masyarakat yang kondusif dengan persentase nilai 5%. Persentase peran serta masyarakat dalam pemilu mencakup Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, tidak ada target pada tahun 2023. Meningkatnya peran serta organisasi dalam penguatan toleransi dan pembangunan mencakup Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Sasaran Meningkatnya peran serta organisasi dalam penguatan toleransi dan pembangunan dengan persentase nilai 34,61%.

POKIN SETELAH DESK



Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
	Meningkatkan Solidaritas di Masyarakat	Indeks Solidaritas Sosial	71,13				
	Terwujudnya Masyarakat Yang Kondusif	Persentase Penurunan Konflik Sosial	5%				Menunjang
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Lembaga Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	98,41%	Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Jumlah Pelaksanaan Bidang Ideologi	98,41%	Menunjang

				Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pancasila dan Karakter Kebangsaan sesuai dengan peraturan yang berlaku		
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Forum Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang Terasilitasi	94,62%	Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sesuai peraturan yang berlaku	94,62%	Menunjang
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas	Persentase Penanganan Konflik Sosial	60,98%	Menunjang

				Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Nasional disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku	60,98%	Menunjang
	Mewujudkan Nilai-Nilai Gotong Royong dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Gotong Royong	3,15				
	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Penguatan Toleransi dan Pembangunan	Persentase Organisasi Masyarakat Yang Aktif	34,61				Menunjang
				Program Pemberda	Persentase	87,66%	Menunjang

				yaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Organi sasi Masyarakat yang diberdayakan		
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sesuai peraturan yang berlaku	87,66%	Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep terdapat 5 Program yaitu : Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya serta Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial, Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, dan Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan tabel terkait Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disimpulkan seluruh kegiatan dan program yang ada telah menunjang dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang ada.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4.360.651.049,00	Rp. 3.313.233.125,00	75,98 %
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Rp. 5.215.000,00	Rp. 4.063.500,00	77,92 %
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.601.599.820,00	Rp. 2.574.332.833,00	71,48 %
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 34.013.106,00	Rp. 27.109.000,00	79,70 %
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 207.090.720,00	Rp. 205.509.800,00	99,24 %
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 36.286.000,00	Rp. 36.280.000,00	99,98 %
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 242.484.800,00	Rp. 232.160.192,00	95,74 %
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 233.961.603,00	Rp. 233.777.800,00	99,92 %
2.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	RP. 979.304.185,00	RP. 963.707.877,00	98,41%
2.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	RP. 979.304.185,00	RP. 963.707.877,00	98,41%
3.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN	RP. 39.646.933.800,00	RP. 39.641.885.450	99,99 %

	PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
3.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	RP. 39.646.933.800,00	RP. 39.641.885.450	99,99 %
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	RP. 76.303.200,00	RP. 66.886.500,00	87,66%
4.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	RP. 76.303.200,00	RP. 66.886.500,00	87,66%
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	RP. 679.512.430,00	RP. 642.952.672,00	94,62 %
5.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	RP. 679.512.430,00	RP. 642.952.672,00	94,62 %
6.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	RP. 1.681.112.200,00	RP. 1.025.127.400,00	60,98 %
6.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	RP. 1.681.112.200,00	RP. 1.025.127.400,00	60,98 %

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Terwujudnya Masyarakat Yang Kondusif							
1.1	Persentase Penurunan Konflik Sosial	5%	5%	5%	RP. 1.681.112.200,00	RP. 1.025.127.400,00	60,98 %	
1.2	Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu	-	-	-	-	-	-	
2	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Penguatan Toleransi dan Pembangunan							
2.1	Persentase Organisasi Masyarakat Yang Aktif	36,19	34,61	34,61	RP. 76.303.200,00	RP. 66.886.500,00	87,66%	

Note:

Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka **tidak efisien**

Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan 1, maka **efisien**

Berdasarkan Tabel 3.9 analisis atas efisiensi anggaran terhadap tingkat pencapaian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Sumenep dapat disimpulkan bahwa capaian serapan anggaran rata-rata sebesar 96,27%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan dan memiliki serapan anggaran sejumlah 96,27%, yang artinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep “Sangat Baik”.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	96,27	96,27	Rp. 4.360.651.049,00	Rp. 3.313.233.125,00	75,98 %	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	14	13	13	Rp. 5.215.000,00	Rp. 4.063.500,00	77,92 %	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	3	3	Rp. 3.601.599.820,00	Rp. 2.574.332.833,00	71,48 %	
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	1	1	Rp. 34.013.106,00	Rp. 27.109.000,00	79,70 %	

1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	2	2	Rp. 207.090.720,00	Rp. 205.509.800,00	99,24 %	
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6	6	6	Rp. 36.286.000,00	Rp. 36.280.000,00	99,98 %	
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	Rp. 242.484.800,00	Rp. 232.160.192,00	95,74 %	
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20	20	20	Rp. 233.961.603,00	Rp. 233.777.800,00	99,92 %	
2.	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	98,41	98,41	RP. 979.304.185,00	RP. 963.707.877,00	98,41%	
2.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter	100	98,41	98,41	RP. 979.304.185,00	RP. 963.707.877,00	98,41%	

	Kebangsaan							
3.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	100	99,99	99,99	RP. 39.646.933.800,00	RP. 39.641.885.450	99,99 %	
3.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantaua	100	99,99	99,99	RP. 39.646.933.800,00	RP. 39.641.885.450	99,99 %	

	n Situasi Politik							
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100	100	100	RP. 76.303.200,00	RP. 66.886.500,00	87,66%	
4.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanipulan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	100	100	RP. 76.303.200,00	RP. 66.886.500,00	87,66%	
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	100	94,62	94,62	RP. 679.512.430,00	RP. 642.952.672,00	94,62 %	
5.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanipulan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,	100	94,62	94,62	RP. 679.512.430,00	RP. 642.952.672,00	94,62 %	

	Sosial dan Budaya							
6.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100	100	100	RP. 1.681.12.200,00	RP. 1.025.127.400,00	60,98 %	
6.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100	100	100	RP. 1.681.12.200,00	RP. 1.025.127.400,00	60,98 %	

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan Tabel 3.10 analisis atas efisiensi anggaran terhadap tingkat pencapaian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Sumenep dapat disimpulkan bahwa capaian serapan anggaran rata-rata sebesar 96,27%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan dan memiliki serapan anggaran sejumlah 96,27%, yang artinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep “Sangat Baik”.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas

penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 02 tujuan, 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat disebabkan beberapa indikator kinerja yang membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, dan masyarakat. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 dinyatakan Berhasil karena realisasi mencapai 96,27%

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 47.423.816.864,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 45.653.793.024,00, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 96,27%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

Sumenep, Februari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMENEP



PURWO EDI PRAWITO, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770908 199802 1 001

